

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian di dunia saat memasuki abad 21 telah meningkatkan kesadaran akan pertanian yang ramah lingkungan hal ini selaras dengan era globalisasi dan perdagangan bebas. Kesadaran peningkatan pertanian ini paling banyak dirasakan di negara-negara maju seperti, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Konsep pertanian berkelanjutan mempertimbangkan 3 aspek yaitu berwatak sosial, bernilai ekonomis, dan kesadaran lingkungan artinya tidak merusak lingkungan (Salikin, 2003).

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang perkebunan, yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Salah satu komoditas pertanian yang banyak diusahakan dan menjadi favorit untuk diusahakan di negara Indonesia adalah kelapa sawit, hal ini dikarenakan didukungnya permintaan yang tinggi akan produk dari kelapa sawit dan faktor-faktor produksi yang memadai untuk melakukan pengusahaan kelapa sawit.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi sentra pengusahaan perkebunan kelapa sawit. Perkembangan Luas Lahan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Tahun 2022

Provinsi	Luas Perkebunan Kelapa Sawit				
	2017	2018	2019	2020	2021
1 Riau	2.209,60	2.706,90	2.741,50	2.853,80	2.860,80
2 Sumatera Utara	1.461,20	1.551,60	1.373,30	1.325,10	1.285,80
3 Jambi	768	1.032,10	1.034,80	1.074,60	1.083,90
4 Sumatera Selatan	768	1.032,10	1.191,40	1.198,00	1.058,60
5 Bengkulu	339,8	311,8	310,7	325,3	319,4
6 Lampung	242,3	201,6	193	196,3	192,6

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa perkembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi mengalami peningkatan pada luas lahan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Kelapa sawit merupakan tanaman yang menghasilkan minyak kelapa sawit yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sawit adalah satu dari sekian banyak tanaman perkebunan yang menjadi primadona untuk diusahakan, sawit juga merupakan salah satu sektor penghasil devisa non migas di negara Indonesia. Berpotensinya komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati didunia telah membuat pemerintah di Indonesia untuk melakukan pengembangan areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Saputri, 2014). Pembangunan perkebunan merupakan salah satu bagian dari pembangunan yang dilakukan di Indonesia, pembangunan perkebunan menyentuh langsung pada

masyarakat dan mampu menjadi pendorong bagi

perekonomian pedesaan. Pembangunan sektor perkebunan mengakibatkan adanya perubahan lingkungan, social budaya, dan ekonomi bagi berbagai pihak (WWF, 2008). Salah satu kontribusi pembangunan perkebunan tersebut ialah pada tanaman perkebunan kelapa sawit

Pengembangan luas areal dan jumlah produksi kelapa sawit di provinsi jambi tidak terlepas dari perkembangan luas areal dan produksi kelapa sawit di kabupaten yang mengusahakan tanaman perkebunan kelapa sawit yang ada di provinsi jambi. Adapun luas areal, produksi dan produktivitas kelapa sawit yang ada di provinsi jambi menurut kabupaten dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Areal, produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Kelapa Sawit Menurut Kabupaten di Provinsi Jambi Tahun 2020

Kabupaten	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Petani (KK)
	TBM	TM	TTM	Jumlah			
Batanghari	12.061	36.006	5.086	53.152	140.905	3.913	24.365
Muaro jambi	15.278	89.964	30.161	135.403	232.725	2.587	61.905
Bungo	24.766	27.612	12.099	64.477	104.038	3.768	22.779
Tebo	15.328	40.211	5.441	60.980	119.033	2.960	18.926
Merangin	11.242	32.763	24.419	68.424	136.787	4.175	42.373
Sarolangon	10.096	22.439	4.706	37.241	54.271	2.419	21.064
Tanjab barat	19.173	41.236	12.706	73.115	119.346	2.894	26.746
Tanjab timur	-	28.541	5.331	33.872	76.378	2.676	11.609
Kerinci	65	19	-	84	14	737	43
Jumlah / Rata-rata	108.009	318.791	99.949	526.748	983.497	2.903,22	229.810

Sumber. Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2 yang merupakan data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat dilihat bahwa kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit terluas ke-empat di provinsi Jambi setelah kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Merangin. Luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten Bungo yaitu 64.208 Ha dengan produksi sebesar 104.038 Ton, di ikuti dengan Produktivitas tertinggi ke-dua setelah kabupaten Merangin yaitu sebesar 3.768 Ton/Ha.

kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang telah menerima sertifikasi ISPO, yang mana terdapat empat kabupaten yang telah menerima sertifikasi ISPO di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kabupaten Bungo merupakan Kabupaten pertama di Provinsi Jambi yang menerima sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dari ke-empat kabupaten yang telah menerima sertifikasi ISPO yaitu diterima pada Tahun 2017. Kelapa sawit di Kabupaten Bungo juga merupakan perkebunan kelapa sawit eksplasma PIR-TRANS dan KKPA. Adapun luas areal, produksi dan produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Bungo menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Bungo Tahun 2020

Kecamatan	LUAS AREAL (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Petani (KK)
	TBM	TM	TTM	Jumlah			
Tanah tumbuh	184	887	20	1.091	1.011	1.140	444
Batin II	89	557	20	666	800	1.436	435
pelayang Rantau pandan	4.125	798	27	4.950	1.331	1.668	1.616
Batin III ulu	1.054	184	5	1.243	732	3.978	789
Pasar muara bungo	4	12	-	16	33	2.750	22
Batin III	53	208	-	261	636	3.058	100
Rimbo tengah	273	524	56	853	1.913	3.651	244
Bungo dani	21	63	-	84	289	4.587	18
Jujuhan	396	522	5	923	2.886	5.529	436
Jujuhan ilir	142	238	-	380	519	2.181	152
Tanah sepenggal	295	1.115	54	1.464	3.977	3.567	511
Tanah sepenggal lintas	134	57	40	231	185	3.246	187
Pelepat	11.772	5.738	288	17.798	19.464	3.392	5.936
Pelepat ilir	1.044	7.581	5.738	14.363	48.334	6.376	4.335
Limb. Lb mengkua	3.527	4.289	5.800	13.616	13.776	3.212	5.463
Muko2 batin VII	809	972	-	1.781	1.563	1.608	649
Batin II babeko	844	3.867	46	4.757	6.589	1.704	1.442
Jumlah	24.766	27.612	12.099	64.477	104.038	3.768	22.779

Sumber. Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 3 menunjukkan bahwa kecamatan Pelepat Iilir memiliki luas areal sebanyak 14.363 Ha dengan produksi sebesar 48.334 Ton.

Diikuti dengan produktivitas yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bungo, yaitu sebesar 6.376 Ton/Ha dan jumlah petani kelapa sawit di Kecamatan Pelepat Ilir yaitu sebanyak 4.335 KK. Selain itu, Kecamatan Pelepat Ilir merupakan satu-satunya kecamatan yang sudah menerima sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) di Kabupaten Bungo.

Dalam melakukan perluasan perkebunan kelapa sawit seringkali tidak mempertimbangkan tindakan konservasi, peralihan dari hutan tropis menjadi perkebunan kelapa sawit dikaitkan dengan deforestasi dan pembakaran hutan di lahan gambut. Penggundulan hutan, penebangan pohon ilegal, penjualan kayu ilegal, dan pembakaran hutan yang dilakukan setiap pembukaan lahan penanaman kelapa sawit memicu pelepasan emisi gas rumah kaca yang akan berdampak pada laju percepatan perubahan iklim. Permasalahan dari perluasan perkebunan bukan hanya mengenai masalah lingkungan, tetapi sosial dan ekonomi. Dari segi sosial, terjadi konflik lahan antar masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, dalam konflik ini posisi masyarakat selalu terkalahkan oleh perusahaan kelapa sawit karena lahan milik masyarakat tidak memiliki bukti secara hukum, banyak diantara tanah milik masyarakat tergolong tanah secara adat atau tanah ulayat yang posisinya akan terkalahkan oleh tanah yang memiliki hak secara hukum. Permasalahan dari segi ekonomi dari sektor perdagangan yaitu berkurangnya daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar internasional karena pengelolaan kebun kelapa sawit yang tidak berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan dan adanya tantangan mengenai produktivitas dan efisiensi yang secara rerata masih rendah dan pengembangan

perkebunan rakyat (Indonesia Eximbank, 2018).

Perkebunan sawit rakyat dikelola oleh petani plasma dan petani swadaya (secara mandiri). Perkebunan rakyat juga telah berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan petani. Jumlah rumah tangga perkebunan kelapa sawit rakyat meningkat dari 1.36 juta pada tahun 2000 menjadi 4.4 juta di tahun 2016. Dan total tenaga kerja yang diserap perkebunan kelapa sawit dari 2.7 juta menjadi 7.8 juta tenaga kerja. Sehingga pendapatan yang diterima petani mengalami peningkatan dengan demikian sektor perkebunan telah membawa petani keluar dari kemiskinan. Namun, tantangan yang akan dihadapi oleh perkebunan rakyat ialah pada tahun 2030, pangsa perkebunan kelapa sawit rakyat meningkat menjadi 60% dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional, maka nantinya perkebunan kelapa sawit Indonesia akan bergantung pada perkebunan kelapa sawit rakyat. Tetapi perkebunan kelapa sawit rakyat saat ini masih menghadapi berbagai masalah diantaranya upaya meningkatkan produktivitas dan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan (GAPKI, 2019).

Dalam melakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, harus menerapkan tiga prinsip yang meliputi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup agar dapat dikatakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan keberlanjutan industri minyak kelapa sawit Indonesia, adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) *Indonesian Sustainable Palm Oil*. Peraturan ini diharapkan menjadi jawaban dari

keraguan pasar dunia atas produk kelapa sawit Indonesia, bahwa produk kelapa sawit Indonesia juga memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dapat dilihat dalam Prinsip dan kriteria ISPO. ISPO merupakan (*mandatory* kewajiban) yang harus dijalankan oleh pelaku usaha perkebunan. Pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, harus memenuhi lima prinsip dan kriteria yang tercantum dalam ISPO, meliputi kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan, penerapan praktek perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati, penerapan transparansi, dan peningkatan usaha berkelanjutan..

Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan (ISPO, 2013).

ISPO merupakan pedoman pengembangan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan ditetapkannya ISPO diantaranya untuk memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia, memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan, dan mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup. Adanya penerapan sertifikasi ISPO membawa dampak positif bagi pelestarian lingkungan. Diperkirakan, di tahun-tahun

mendatang label ramah lingkungan ini akan semakin dianggap penting, sejalan dengan menguatkan pemikiran dan kesadaran terhadap penjagaan lingkungan di seluruh dunia. (Kospa, 2016).

Bagi perkebunan besar, tidak sulit untuk menerapkan sertifikasi ISPO, namun bagi petani plasma, kemungkinan sedikit sulit untuk menerapkannya, karena itu perlu dilakukan kerjasama antara petani plasma melalui koperasi (KUD) dengan perusahaan perkebunan dan lembaga pendukung lainnya sebagai mitra untuk membantu petani plasma dalam mengimplementasikan ISPO. Kerjasama ini bisa diwujudkan dalam pemberdayaan organisasi petani yang efektif dan efisien (Dianti, 2011).

Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan, tindakan, atau sikap, tidak hanya berupa ucapan. Menurut Benjamin Bloom (1956), yang dikenal dengan Segitiga Taksonomi, terdiri dari *Head* (kepala) yang mendeskripsikan pengetahuan, *Heart* (Hati) yang mendeskripsikan sikap, dan *Hand* (Tangan) yang mendeskripsikan keterampilan (Budiman, 2013). Diperuntukkan guna mencapai perubahan perilaku yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak mau menjadi mau, dan yang awalnya tidak berderak menjadi bertindak (Budiman, 2013; Hapsari, 2014).

Petani milenial adalah petani yang berusia sekitar 19-39 tahun (kementrian pertanian). dengan mengandalkan teknologi dan mengikuti perkembangan jaman, petani generasi milenial memiliki banyak peluang dibandingkan generasi sebelumnya dan tentunya juga membutuhkan dukungan dari pemerintah. Sudah banyak program-program petani milenial yang tersebar tujuannya adalah mengajak para petani untuk

mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, dengan melibatkan kemajuan teknologi dapat memperoleh nilai tambah dan meningkatkan penjualan produk, peluang ini harus dimaksimalkan agar semakin banyak anak muda yang terjun ke dunia pertanian dengan harapan

petani milenial akan menggerakkan kewirausahaan bidang agrikultur yang menjadikan wajah pertanian menjadi lebih segar dan atraktif untuk bisa berkelanjutan.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang “ **Studi Perilaku Petani Milenial Bersertifikat ISPO dan tidak bersertifikat ISPO dalam sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Pada hakekat nya tujuan petani adalah memperoleh pendapatan yang besar, oleh karena itu petani bersikap rasional untuk memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya. Perkebunan kelapa sawit bersifat kompleks karena terkait dengan penurunan kualitas lahan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial antara masyarakatsekitar. Pengelolaan kebun kelapa sawit kurang memenuhi standart yang dianjurkan, selain produksi yang rendah pengelolaan yang tidak memenuhi standart juga berdampak terhadap umur ekonomis kelapa sawit yang lebih pendek. Masih banyak perkebunan kelapa sawit yang tidak memenuhi standart dengan pernyataan diatas membuat penulis mengangkat beberapa hal yang dijadikan sebagai rumusan

masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku petani milenial yang sudah bersertifikat ISPO dan tidak ISPO dalam sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Karya Harapan Mukti Kabupaten Bungo?
2. Apakah terdapat perbedaan yang nyata perilaku petani milenial bersertifikat ISPO dan tidak ISPO dalam sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Karya Harapan Mukti Kabupaten Bungo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perilaku petani milenial yang sudah bersertifikat ISPO dan tidak ISPO dalam sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Karya Harapan Mukti Kabupaten Bungo.
2. Untuk menganalisis perbedaan perilaku petani milenial bersertifikat ISPO dan tidak ISPO dalam sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Karya Harapan Mukti Kabupaten Bungo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai :

1. Salah satu syarat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
2. Bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai perbandingan perkebunan kelapa sawit yang sudah dan belum bersertifikat ISPO.